SANG PREDATOR

Vipaldi Desta

SANG PREDATOR

Penulis:
Vipaldi Desta
Penata Isi:
NY20

Diterbitkan oleh **Pe'ar Press**, serta didistribusikan oleh **Talas Press** dan **Contemplative Publishing**. Cetakan pertama, Agustus 2025.

Anti-hak cipta.
Segala bentuk teks, gambar, atau hal lain yang kamu inginkan sepenuhnya menjadi milikmu. Silakan ambil dan manfaatkan sesuka hati tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu.

37 hlm, 14,8 x 21 cm

Instagram:
@pearpress_
@talaspress
@___contemplative

WENCHE
BIELE
LOUISE
MEUNIER
FRUSTA
CONDOR
EDA
JESH
HOCR

Lawan segala bentuk kejahatan, terutama yang datang dari dirimu sendiri.

SANG PREDATOR

Prolog

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, negara bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses sosial yang panjang, lahir dari kebutuhan manusia untuk menjual narasi hidup bersama dalam keteraturan. Sejak masa prasejarah, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil, berburu dan meramu secara komunal tanpa adanya sistem kekuasaan formal. Kemudian, ketika masyarakat berkembang melalui pertanian, kepemilikan tanah, dan peningkatan populasi, muncul kebutuhan palsu untuk mengatur distribusi sumber daya, mengelola konflik, dan menjaga keamanan. Inilah benih awal lahirnya negara sebagai lembaga otoritas yang memegang kendali atas suatu wilayah dan penduduk. Secara historis, negara pertama kali muncul di wilayah Mesopotamia sekitar 3000 SM, ketika masyarakat mulai membentuk pemerintahan pusat yang mengatur urusan ekonomi, hukum, dan keagamaan (Claessen & Skalník, 1978). Negara dalam bentuk awalnya sangat erat kaitannya dengan agama dan kekuasaan raja, di mana raja diposisikan sebagai wakil dewa atau bahkan dewa itu sendiri. Negara menjadi alat untuk mengorganisasi masyarakat yang semakin kompleks, dan dari sinilah muncul konsep hukum, pajak, serta sistem administrasi.

Dalam ranah filsafat politik, para pemikir besar seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau mengembangkan

apa yang dikenal sebagai teori kontrak sosial. Bagi Hobbes, dalam kondisi alamiah (state of nature), manusia hidup dalam ketakutan dan konflik abadi. "Homo homini lupus", begitu katanya dalam Leviathan (1651). Untuk menghindari kekacauan ini, manusia menyerahkan sebagian kebebasannya kepada otoritas yang disebut "negara", yang bertugas menjaga ketertiban dan menjamin keselamatan. Berbeda dengan Hobbes, John Locke dalam Two Treatises of Government (1689) menekankan bahwa negara terbentuk untuk menjamin hak-hak alamiah manusia: hidup, kebebasan, dan hak milik. Sementara Rousseau menambahkan bahwa negara yang sah adalah yang lahir dari kehendak umum (volonté générale) dan mencerminkan persetujuan seluruh warga masyarakat (Du Contrat Social, 1762). Negara, dalam pandangan fungsionalis modern, memiliki fungsi mendasar: menegakkan hukum, menyediakan layanan publik, menjaga keamanan, dan mengatur kehidupan ekonomi serta politik masyarakat. Negara dianggap sebagai alat yang memungkinkan manusia hidup dalam komunitas besar tanpa jatuh ke dalam kekacauan.

Meski demikian, tidak semua pandangan melihat negara sebagai entitas netral atau niscaya. Karl Marx melihat negara sebagai produk dari pertentangan kelas dan berfungsi sebagai alat dominasi kelas borjuis terhadap proletariat. Negara, kata Marx, akan menjadi usang ketika masyarakat tanpa kelas terwujud (The Communist Manifesto, 1848). Sementara kaum anarkis seperti Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin justru melihat negara sebagai bentuk tertinggi dari

penindasan yang harus dihapuskan, karena kekuasaan terpusat cenderung korup dan represif. Meskipun banyak kritik terhadap bentuk-bentuk negara yang eksploitatif dan otoriter, hingga hari ini negara tetap menjadi struktur dominan dalam kehidupan manusia. Ini karena kekuatan paksa yang dimilikinya, dan juga karena bentuk organisasi sosial lain yang mampu menggantikan peranannya secara menyeluruh sulit untuk diwujudkan.

Sejarah umat manusia adalah sejarah belajar: belajar dari alam, dari sesama, dan dari masa lalu. Tapi belajar tidak selalu berlangsung dalam ruang kelas atau di bawah bimbingan guru. Jauh sebelum ada sekolah atau kampus, manusia belajar secara informal melalui cerita orang tua, tradisi lisan, atau praktik sehari-hari dalam berburu, bertani, dan beribadah. Namun seiring waktu, kebutuhan akan keteraturan sosial, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pelestarian budaya memaksa manusia membentuk institusi pendidikan formal. Dari sinilah sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi lahir sebagai bagian dari infrastruktur sosial yang kompleks.

Institusi pendidikan pertama kali muncul dalam masyarakat yang telah memiliki struktur politik dan ekonomi yang mapan. Di Mesir Kuno dan Babilonia, lembaga pendidikan diciptakan untuk mencetak para juru tulis dan pejabat kerajaan. Di Tiongkok, sistem pendidikan kenegaraan telah berkembang sejak Dinasti Zhou (sekitar 1000 SM), dan menjadi tulang punggung sistem birokrasi yang berbasis meritokrasi, terutama melalui ujian sipil (civil service examination)

yang diinstitusionalisasi pada masa Dinasti Han. Sementara itu, dunia Yunani Kuno menawarkan bentuk pendidikan yang lebih filosofis. Plato mendirikan Akademi sekitar tahun 387 SM, dan Aristoteles mendirikan Lyceum sekitar tahun 335 SM. Lembaga-lembaga ini menjadi ruang dialog antara pemikiran metafisika, etika, dan politik. Di sini, pendidikan bukan sekadar pewarisan keterampilan, tetapi pencarian kebijaksanaan (sophia) dan kebenaran. Pandangan ini terus berpengaruh dalam gagasan Barat tentang pendidikan hingga kini. Di dunia Islam, pendidikan tinggi mencapai bentuk yang lebih terstruktur dan inklusif. Sejak abad ke-8, pusat studi seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad menjadi tempat penerjemahan, kajian filsafat, dan pengembangan ilmu pengetahuan lintas budaya. Tak lama kemudian, muncul lembaga madrasah, dan universitas seperti Al-Qarawiyyin (859 M) dan Al-Azhar (970 M) yang menjadi pusat pengajaran agama dan sains. Lembaga-lembaga ini didanai oleh wakaf dan dikelola ulama, tetapi tetap memiliki relasi tertentu dengan penguasa Muslim. Sementara itu, di Eropa Abad Pertengahan, pendidikan tinggi berakar pada sekolah-sekolah katedral yang dikelola Gereja Katolik. Lahirnya Universitas Bologna (1088), Universitas Paris (sekitar 1150), dan Universitas Oxford (1096) menandai munculnya sistem universitas dengan struktur kurikulum, jenjang gelar, dan otonomi akademik. Kata "universitas" sendiri berasal dari universitas magistrorum et scholarium, komunitas guru dan murid yang mencerminkan cita-cita kolektif pencarian ilmu.

Meski demikian, institusi pendidikan tidak selalu bebas dari kekuasaan. Ketika negara-bangsa modern lahir pada abad ke-17 hingga 19, universitas mulai diintegrasikan ke dalam proyek nasional. Di Prusia, Wilhelm von Humboldt mendirikan Universitas Berlin (1810) sebagai institusi negara yang menyatukan pengajaran dan penelitian, tetapi tetap menjunjung kebebasan akademik. Model inilah yang kemudian menjadi acuan banyak negara dalam merancang sistem pendidikan tinggi nasional. Di dunia modern, institusi pendidikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur negara dan pembangunan. Negara mendanai, mengatur kurikulum, dan menjadikan pendidikan sebagai alat strategis yang katanya untuk mencetak warga negara yang produktif, loyal, dan terampil. Dalam konteks pascakolonial seperti Indonesia, universitas negeri didirikan untuk mencerdaskan bangsa, memperkuat identitas nasional, dan mengurangi ketimpangan sosial-walaupun dalam praktiknya, institusi ini juga sangat rentan dikontrol oleh kekuatan politik dan ekonomi.

Lalu, mengapa manusia membentuk dan mempertahankan institusi pendidikan? Jawabannya lebih dari sekadar kebutuhan teknis. Institusi pendidikan adalah tempat di mana pengetahuan dikodifikasikan, nilai-nilai diwariskan, dan masa depan disiapkan. Ia adalah mekanisme sosial untuk mentransformasi individu menjadi subjek budaya, ekonomi, dan politik. Institusi Pendidikan juga bisa menjadi alat pembebasan atau justru alat dominasi, tergantung siapa yang mengaturnya dan untuk kepentingan apa. Dalam dunia kapitalisme lanjut, pendidikan sering diposisikan sebagai mesin

produksi tenaga kerja; dalam dunia otoriter, ia bisa menjadi pabrik ideologi negara. Maka, penting untuk terus mengkritisi dan merefleksikan apa tujuan dari pendidikan, dan untuk siapa institusi pendidikan itu dibangun.

Aku tidak mau jadi warga negara yang baik,
Aku tidak butuh negara yang lebih baik.
Aku tidak mau jadi warga negara yang ramah,
Aku tidak butuh polisi dan tentara yang lebih ramah.
Aku tidak mau jadi warga negara yang patuh,
Aku tidak butuh negarawan yang lebih patuh terhadap konstitusi.

Aku mencintai negeri ini
tapi cintaku dikhianati para petinggi

dan hari ini

sampai nanti mati

aku memilih
mencintai diri sendiri

saja

dan hanya.

WILAYAH YANG DICURI

DARI APA YANG DISEBUT

I N D O N E S I A

Ketika bulan sedang menjadi sepatu, kipas angin di kamarku begitu kesal. Ia berdiri gagah di sudut ruangan, berputar seperti kompas mabuk, meniupkan angin dengan semangat seorang penyair gagal yang ingin sekali menyampaikan kemarahan lewat bulir debu.

Ia berkata:

> "Negara tidak pernah membebaskan kita, ia bukan rumah, ia bukan ibu, ia bukan pelindung. Indonesia adalah hantu kolonial yang mengganti bendera, mengganti bahasa perintah, tetapi mempertahankan logika kekuasaan yang sama: mengatur, mengontrol, merampas, menindas. Sejak hari pertama ia diumumkan dengan gegap gempita oleh segelintir elit di atas podium kemerdekaan, ia bukan dibangun untuk rakyat, melainkan untuk mengelola rakyat. Kita tidak pernah sungguh-sungguh lepas dari kolonialisme; kita hanya mewarisinya dalam bentuk yang lebih halus, lebih terselubung, tapi sama menyesakkan. Lihatlah bagaimana Indonesia bersikap: ia tidak hadir saat anak-anak kelaparan, saat petani diusir, saat nelayan dibunuh lautnya. Tapi ia hadir dengan sangat cepat untuk menertibkan, untuk menagih pajak, untuk memasang baliho para penipu. Indonesia hadir bukan sebagai pelindung, tapi sebagai

penagih utang; bukan sebagai teman, tapi sebagai tuan. Kita diajari sejak kecil mencintai tanah air, bukan karena kita lahir darinya, tetapi karena Indonesia membutuhkan cinta yang buta untuk menutup mulut yang ingin bertanya. Kita belajar menyanyikan lagu kebangsaan sebelum kita tahu bagaimana mengisi perut sendiri, kemudian kita disuruh bangga, walau setiap jengkal tanah dijual ke korporasi, setiap tetes air dijadikan komoditas.

Indonesia adalah alat dominasi struktural yang dibentuk bukan untuk kesetaraan, tetapi untuk mengabadikan hierarki dan kekuasaan. Ia adalah kekuatan yang melanggengkan ketimpangan, membungkam perlawanan, dan memproduksi hukum agar ketidakadilan tampak sah. Indonesia lahir dari meja-meja negosiasi elit yang se-dari awal dipenuhi birokrat warisan kolonial, polisi didikan Belanda, tentara dengan doktrin kekuasaan, dan sistem hukum yang lebih akrab dengan pasal-pasal penjajahan ketimbang pembebasan. Indonesia tidak didirikan untuk menghancurkan struktur kolonial, melainkan untuk merebrandingnya menjadi nasionalisme. Setiap lima tahun, kita dipanggil untuk mencoblos, tapi suara kita hanya valid sejauh ia meneguhkan ilusi demokrasi, kita disebut ‘rakyat’, tapi hanya saat pemilu, setelah itu, kita kembali jadi objek yang diatur, diawasi, dan didiamkan. Jika Indonesia tak mampu memperlakukan kita dengan baik, tidak mampu melindungi alam, atau menyembuhkan luka sejarah, maka kita patut

> bertanya: untuk apa ia ada? mengapa kita harus menyembahnya? mengapa kita harus menunduk pada kekuasaan yang bahkan tak tahu bagaimana hidup kita dijalani? sudah saatnya kita membongkar mitos negara, dan mungkin hanya dengan itu, kita bisa kembali menjadi manusia seutuhnya.”

Begitu ucapnya.
Apa yang ia katakan?
Apa yang ia maksud?
Kukira itu luar biasa.

Sebab negara adalah pabrik kebodohan
dan kebodohan adalah bahan bakar kekuasaan.

DAN AKU MATI
DI *RUMAH*KU SENDIRI

Sebatang gajah baru menghampiriku dengan membawa secarik kertas. Ia datang tentu tidak dengan sendirinya, karena ia tidak memiliki kaki.
Lalu, siapa?
Oh, kipas angin.

Kertas itu berisi tulisan:

> "Negara adalah mesin, mesin tua berkarat yang menggerus hidup, menggiling akal sehat, dan mencetak manusia patuh demi kelanggengan kekuasaan. Tidak peduli siapa presidennya, siapa menterinya, atau siapa parlemenya, selama struktur negara tidak dihancurkan, rakyat tetap jadi korban. Negara adalah pabrik kebodohan yang bekerja tanpa henti. Bukan karena ia tak tahu cara mencerdaskan rakyat, tapi karena kebodohan adalah bahan bakar kekuasaan. Institusi pendidikan dengan kontrol negara tidak lain adalah sebuah teater kekuasaan yang menjelma menjadi pelayan penguasa, alat untuk menjinakkan akal dan membunuh daya kritis. Ia berdiri atas nama kemajuan, pencerahan, kesuksesan, tetapi dibalik temboknya berlangsung proses yang brutal: penyeragaman pikiran, penyerapan ideologi dominan, dan pemiskinan imajinasi. Kemarin, kita diperlihatkan negara yang ingin melakukan penulisan ulang

sejarah resmi versi mereka sendiri. Perlu kita ingat bahwa fenomena tersebut bukanlah hal yang baru, tetapi memang sudah menjadi pola di negara manapun, hal tersebut dilakukan oleh penguasa atau rezim dominan untuk mengontrol narasi kolektif demi kepentingan politik, nasionalisme, atau ideologi tertentu. Michel Foucault (1926-1984) dalam hal ini menolak anggapan bahwa pengetahuan itu netral atau berdiri di luar kekuasaan. Dalam Kumpulan esai dan wawancara yang diterbitkan pada tahun 1977, Faucault memperkenalkan apa yang disebutnya 'genealogi pengetahuan', dimana pengetahuan yang dapat kita kosnsumsi itu tergantung dari siapa yang memimpin, menguasai atau mendominasi. Kekuasaan dan pengetahuan terjalin dalam hubungan yang tak terpisahkan. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebenaran, juga memiliki kekuasaan atas cara kita hidup, berfikir, dan memahami diri kita sendiri.

Mereka tahu, tidak ada tirani yang bisa bertahan tanpa rakyat yang bodoh. Maka mereka menciptakan rakyat yang mudah percaya, mudah diadu, mudah dibeli. Bersamaan itu, tanah-tanah petani dirampas, hutan dibabat, gunung dikeruk, sungai diracun. Mereka bilang, batu bara untuk listrik rakyat. Tapi PLN dikapitalisasi, listrik dimonopoli, dan rakyat harus membayar tagihan sambil tetap membayar pajak. Mereka bilang, nikel untuk hilirisasi, tapi hasilnya tetap lari ke kantong segelintir taipan. Konstitusi bilang

kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Tapi realitasnya? Oligarki menguasai segalanya. Atas nama PSN (Proyek Strategis Nasional) mereka seenaknya menghancurkan ruang hidup. Negara hanya menjadi alat akumulasi kapital. Mereka mencetak kebijakan, mengamankan investasi, dan mengatur narasi. Dan ketika rakyat melawan, TNI dan Polri dilepas sebagai anjing penjaga modal. Mereka bukan pelindung, mereka adalah algojo. Gas air mata, peluru karet, pukulan, dan penangkapan menjadi bahasa sehari-hari mereka terhadap rakyat yang mempertahankan hidupnya. Agama pun tak luput dari pembajakan. Di tangan negara dan oligarki, agama menjadi alat legitimasi kekerasan. Mimbar-mimbar dikendalikan. Ormas-ormas dijadikan satelit kekuasaan. Ayat dipakai untuk menyuruh rakyat sabar dalam kemiskinan, ikhlas dalam penderitaan. Mereka bicara tentang akhirat, sementara mereka menyantap dunia tanpa kenyang. Inilah wajah negara: mesin kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor busuk, dibungkus dalam bendera, dibaptis dalam agama, dan disahkan oleh akademisi palsu. Mereka tidak butuh rakyat cerdas, mereka butuh rakyat bodoh yang gampang diatur. Mereka tidak ingin kampus-kampus yang kritis, mereka ingin pusat produksi riset untuk legitimasi eksploitasi. Mereka tidak membangun demi rakyat, mereka membangun untuk akumulasi. Mereka tidak beragama demi kemanusiaan, mereka beragama untuk menundukkan.”

Aku terkejut, karena saat membacanya, seekor beruang— berhasil menggigitku.

.°`•`°.

Aku tidak menunggu pemilu
Aku tidak percaya reformasi
Aku tidak butuh presiden baru
Aku butuh dunia baru.
Dunia tanpa birokrasi, tanpa polisi, tanpa tentara, tanpa parlemen
Dunia tanpa paksaan, tanpa perintah, tanpa dominasi
Dunia dimana keputusan diambil bersama, bukan dipaksakan
Dunia tanpa negara.

“Ketika segala hal yang hidup ditindas oleh sistem yang mati, maka satu-satunya jalan adalah menghancurkan sistem itu. Tidak dengan kompromi, tapi dengan perlawanan.”

MAKA HISAP AKU

H I D U P - H I D U P

Dini hari di Kampung Tangkil, udara dingin seperti menyembunyikan bara yang sebentar lagi menyala. Rumah-rumah kecil berderet dalam sunyi yang mencekam. Samsul duduk di warung kopi yang sudah hampir tutup, berhadap-hadapan dengan Dani. Mereka berteman sejak kecil, tapi malam ini bukan pertemuan biasa.

"Aku lihat kau ikut mereka tadi, Dan," kata Samsul, pelan. Dani menunduk. Wajahnya masih dibalut debu dan peluh, “Aku nggak bisa diam aja, Sul. Mereka bilang rumah itu dijadikan gereja. Kau tau sendiri di sini mayoritas Muslim."

Samsul menghela napas. "Kau pikir itu soal agama?"
Dani diam.

"Yang tinggal di rumah itu cuma tiga keluarga Kristen dari luar daerah. Mereka baru pindah, menyewa rumah itu untuk tinggal sementara. Tapi karena gak ada gereja dekat sini, mereka ibadah di situ. Apa itu langsung jadi ancaman buat kita?"
"Aku gak tau sih. Tapi orang-orang bilang itu penistaan. Lagipula, siapa mereka berani ibadah di sini?"

Samsul menatap langit-langit warung yang penuh sarang laba-laba. "Kau lupa waktu kita sekolah dulu? Kita nggak pernah dapat

pelajaran agama yang adil. Yang diajarkan cuma bagaimana jadi patuh, bukan berpikir. Negara gagal ngajari kita tentang toleransi sejati, gagal kasih pendidikan layak, kerja layak. Jadi marah kita dialihkan ke yang dekat dan lemah."

Dani mengernyit. "Kau mulai lagi dengan teori-teori usangmu. Kau bicara tentang negara, oligarki, tapi kami lapar. Kami gak bisa bayar sekolah. Kami gak punya tanah. Yang kami tahu cuma: kami marah."

Samsul mengangguk. "Justru itu yang ku maksud sul. Marah kau benar, tapi sasarannya salah. Seharusnya marah kau naik, bukan ke samping, tapi ke mereka yang ambil tanah kita, hancurin pasar rakyat, bikin kita begini."

Dani terdiam. Matanya mulai berkaca.

Samsul melanjutkan, "Seharusnya kita bersatu melawan elit, bukan pecah karena bendera suku atau agama'. Mereka senang melihat kita bertengkar. Sementara di kampusku, negara masuk lewat program 'Moderasi Beragama'. Mereka sebut itu solusi, seolah kekerasan hanya lahir dari ajaran, bukan dari kemiskinan terstruktur, bukan dari ketidakadilan."

"Moderasi beragama itu apa?" tanya Dani.

"Doktrin. Versi negara tentang agama. Supaya kita tetap jinak. Mereka tak pernah bicara soal ketimpangan. Tak pernah ajarkan bahwa yang menyulut api bukan kitab, tapi perut lapar, sekolah bobrok, dan rumah-rumah yang tak punya jendela."
Dani mengusap wajahnya. "Aku... aku takut, Sul. Aku benar-benar takut. Aku cuma ingin hidup tenang."

"Kalau begitu, berhenti jadi alat. Jangan hancurkan rumah orang hanya karena mereka berbeda. Kita tak butuh musuh baru. Kita perlu sekutu." Dani menatap sahabatnya. Perlahan, tangannya menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. "Apa menurutmu mereka mau memaafkan?" tanyanya pelan.

Samsul tersenyum pahit. "Kalau kita mau jujur, dan benar-benar bertobat, mungkin... mereka lebih manusia daripada kita."

Di luar warung, angin mulai menggeser dedaunan yang gugur. Di antara dinding-dinding rumah yang retak dan api kemarahan yang perlahan padam, dua pemuda duduk berhadapan. Di wajah mereka, masa lalu dan masa depan bersilangan. Satu kaki masih tertinggal dalam kebencian, yang lain mencoba melangkah keluar dari lingkaran.

.°`•`°.

Malam turun perlahan. Hujan mengguyur jalanan aspal, membasahi daun-daun trembesi di pelataran kampus yang sepi. Aku dan Leno duduk di bawah kanopi kantin, menyeruput kopi sachet dari warung sebelah. Asap rokok kretek mengepul pelan di antara jeda percakapan.

“Pagi tadi aku ikut forum diskusi,” kataku membuka obrolan. “Diselenggarakan oleh sebuah NGO lingkungan. Topiknya tentang *Blue & Green Economy*. Tapi entah kenapa, rasanya... hampa.”
Leno menoleh, menyimak.

“Awalnya terdengar menjanjikan,” lanjutku. “Mereka bicara soal ekonomi berkelanjutan, industri ramah lingkungan, solusi hijau untuk menyelamatkan bumi. Tapi makin lama, aku sadar kalau semuanya cuma kamuflase. Mereka tidak ingin menantang sistem, mereka justru mempercantik wajah kapitalisme. Semua argumen diarahkan untuk menjadikan ‘pasar’ sebagai pahlawan.”
Leno mengangguk pelan. “Itu yang disebut kapitalisme hijau.”

“Ya,” kataku, menatap genangan air yang memantulkan langit mendung. “Mereka menjual ilusi bahwa kita bisa menyelamatkan bumi tanpa meninggalkan kapitalisme. Padahal, kapitalisme lah yang melahirkan krisis ini. Mereka tidak mau menyentuh akar. Seolah-olah, kalau kita ganti plastik dengan bambu, atau batubara dengan panel surya, semua akan baik-baik saja. Tapi siapa yang membuat

solar panel? Siapa yang punya lahannya? Siapa yang diekstraksi untuk logam rare-earth-nya?"

"Dan siapa yang tetap memanen keuntungannya," sahut Leno.

"Aku tidak sedang menghakimi orang yang masih percaya dengan pendekatan reformis. Tapi kadang aku cuma ingin kita jujur. Kapitalisme bukan sekadar moda produksi. Ia yang kemudian selanjutnya membentuk cara berpikir, cara melihat dunia, cara memperlakukan satu sama lain. Bahkan memperlakukan pohon, sungai, hewan... semua jadi komoditas."

Leno diam sejenak. Matanya tajam namun tenang. Ia menggulung lengan jaketnya, lalu berkata, "Apa yang kamu rasakan, itu persis yang dikritik si Bookchin. Ia bilang, kita tidak bisa menyelesaikan krisis ekologi hanya dengan mengubah teknologi atau gaya hidup individu. Kita harus mengubah struktur sosialnya. Sebab akar dari krisis ekologis adalah hierarki dominasi manusia atas manusia, yang lalu diterjemahkan menjadi dominasi manusia atas alam."

Aku menatapnya. "Jadi, bukan cuma kapitalisme?"
"Kapitalisme adalah bentuk ekstremnya. Tapi akar terdalamnya adalah hierarki itu sendiri. Sejak manusia belajar menindas manusia lain dalam bentuk patriarki, kelas, di situlah hubungan eksploitatif dengan alam mulai lahir. Solusinya bukan sekadar ekonomi hijau,

tapi membangun masyarakat yang bebas dari dominasi: yang setara, partisipatif, saling merawat.

Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang sudah lama menggumpal di benakku, tapi belum bisa kutemukan namanya.
“Jadi,” lanjut Leno, “jika kita ingin menyelamatkan alam, kita juga harus menyelamatkan masyarakat dari sistem yang menindas. Perubahan ekologis adalah perubahan sosial. Hijau yang sejati bukan yang dijual di etalase perusahaan, tapi yang tumbuh dari akar komunitas yang bebas.”

Angin malam berhembus. Aroma tanah basah bercampur kopi dan tembakau memenuhi udara.

“Kita harus mulai dari mana, Len?”
Leno tersenyum. “Mungkin... dari menyadari bahwa dunia ini bisa lain. Bahwa kapitalisme bukan kodrat. Ia lahir dari sejarah, dan bisa kita akhiri dalam sejarah.”

Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya malam ini, langit mendung terasa tidak terlalu berat.

.°`•`°.

Suara drum anak-anak karang taruna terdengar dari ujung gang. Dentumnya mengiringi suara ibu-ibu yang sibuk menyiapkan lomba

balap karung dan tarik tambang. Bendera merah putih mulai dipasang di setiap pintu rumah, di tiang bambu, bahkan di motor-motor yang mogok di depan bengkel. Udara kota ini semakin kotor, tapi mereka tetap bernyanyi: *"Indonesia tanah airku..."*
Sementara itu, di sebuah kamar kost berukuran 3x4 meter, dua manusia duduk bersandar pada dinding yang lembab dan catnya mengelupas. Kipas angin tua berderit seperti tenggorokan orang yang tersedak sistem. “Lu bakal ikut upacara besok?” tanya Ardi, menyalakan sebatang rokok yang tinggal separuh. “Buat apa?” jawab Rian datar. “Merdeka apanya? Kita ini cuma rakyat sewaan. Lahir bayar. Hidup bayar. Mati pun bayar.”

Mereka tertawa. Tawa getir. Tawa orang-orang yang sadar bahwa hidup ini semacam permainan sadis. Negara cuma penonton, atau bahkan dalang yang duduk di tribun, menyaksikan mereka jatuh satu per satu.

“Gua gak ngerti ya,” sambung Ardi, “Kenapa masih banyak orang yang percaya dengan dongeng itu. Setiap tahun dikasih satu hari buat pura-pura bahagia, padahal 364 hari lainnya kita dihisap hidup-hidup. Merah putih dikibarkan, padahal darah dan tulang kita yang dijual.”
Rian berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit yang nyaris tak biru. Sambil menghela nafas ia berkata “Indonesia tanah airku…, tanahku sewa, airku beli. Kalau di halaman rumah lu ada ganja, itu milik lu. Tapi kalau yang ketemu gas, minyak, emas, atau nikel... itu milik negara. Negara yang mana? Negara siapa?”

“Negara milik oligarki,” Ardi menyahut. “Kita ini cuma alat. Kayak cangkul. Atau sandal jepit. Dipakai sampai jebol, terus dibuang.”

Tiba-tiba pintu terbuka keras. Dani, teman sekamar mereka, masuk dengan wajah penuh keringat dan amarah. Seragamnya bau minyak goreng dan keringat basi.

“Cape anjiiiiing!!” teriaknya. “Delapan jam kerja tanpa istirahat. Bos gua bilang: ‘Kalau gak kuat kerja, banyak yang ngantri di luar.’ Dan tiap hari café itu rame. Rame banget bangsat! Tapi gaji gua? Bahkan gak nyampe UMR. Padahal omset mereka bisa bayar satu RW!”

Ia duduk di lantai, menunduk. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena marah yang tak punya tempat meledak.

“Lu kira lu satu-satunya yang ngerasain dunia kayak neraka?” tanya Ardi. “Kita semua ada di sini karena sistem ini emang dibikin buat nindas. Kapitalisme itu bukan sekadar moda produksi. Dia agama. Negara jadi rumah ibadahnya. Pajak, upacara, konstitusi itu semua ritual pemujaannya.”

“Lu anggap dunia ini emang dari sananya jahat?” kata Rian. “Enggak, bro. Dunia dijadiin jahat oleh orang-orang yang duduk di kursi empuk, sambil nyuruh kita kerja keras biar mereka bisa minum wine dan berlibur ke Eropa, terus bilang kalau orang miskin itu goblok,

arogan, pemalas.” Dani diam. Nafasnya berat. Ia semakin sadar, bahwa penderitaan yang ia rasakan bukan nasib, tapi rancangan.

“Kita ini cuma statistik,” lanjut Ardi. “Angka-angka di grafik pertumbuhan. Lembur lu? Masuk PDB. Peluh lu? Masuk laba perusahaan. Tapi coba lu sakit, coba lu gagal, negara gak bakal nolong lu. Dia cuma datang pas waktunya nagih: pajak, tilang, pungutan, aturan.” Rian melempar buku catatannya ke lantai. “Cukup, lah. Kita udah terlalu lama tunduk. Ini bukan sekadar kegagalan pemerintahan. Ini bukan soal presiden. Ini soal seluruh sistem yang harus dibakar habis.”

“Gua lelah,” bisik Dani. “Tapi gua ngerti. Lelah gua bukan karena dunia terlalu berat. Tapi karena dunia ini dibikin buat ninggalin orang kayak gua di bawah.”

Ketiganya terdiam.
Di luar, suara drum dan nyanyian kemerdekaan terus berlanjut. Tapi di kamar itu, satu bendera dibakar dalam imajinasi.

Sebelum masuk liang lahat
aku sudah mati sejak lama

FUCK
THE
1%

Makam-makam membeku di penjuru negeri yang 'biru'
Arwah-arwah bercumbu menangisi keadaanmu
Sejarah pitarah merintih, prihatin pada bangsamu
Kepada Pahlawan; Indonesia malu

Bhinneka Tunggal Ika membusuk di bawah kaki Garuda
Pancasila demam tinggi karena palsunya sila kelima
Undang-Undang Dasar mengamuk karena jadi dongeng belaka
Kepada Tuhan; Indonesia berdosa

Dan saksikanlah :
Sesungguhnya aku mencintai negeri ini
namun cintaku dikhianati para petinggi

—NY20

EPILOG

Negara usang ini telah bobrok sejak 1945 dan tidak akan pernah ada reformasi yang cukup. Segala omong kosong tentang reformasi bertahap, negara kesejahteraan, atau pemerintahan yang lebih baik adalah ilusi yang dibuat oleh mereka yang takut pada kehilangan kekuasaan, negara tidak bisa diperbaiki, negara harus dihancurkan. Sejarah manusia adalah sejarah pengkhianatan terhadap revolusi. Dari Komune Paris hingga Kuba, dari Bolshevik hingga Revolusi Iran - selalu berakhir pada pola yang sama: rakyat bangkit, kekuasaan lama tumbang, tapi negara tetap hidup, dan ketika negara tetap hidup, dominasi tidak pernah mati, ia hanya berganti wajah. George Orwell menulis *Animal Farm* sebagai alegori pahit dari kenyataan ini. Dalam kisahnya, hewan-hewan menggulingkan manusia, hanya untuk kemudian dikuasai oleh para babi yang mengambil alih kekuasaan. Babi-babi itu tak ubahnya tiran baru, yang mengulang semua penindasan yang sebelumnya mereka perangi. Pesannya jelas: revolusi yang tidak menghancurkan seluruh struktur dominasi hanya akan menciptakan rantai baru. Reformasi adalah bentuk penipuan, ia dijanjikan untuk menunda kemarahan, menumpulkan taring pemberontakan, dan menjinakkan rakyat. Kita lihat sendiri: sejak 1998, reformasi dijanjikan, demokrasi dipuja, pemilu diulang, presiden berganti, tapi oligarki tetap sama berkuasa, tanah tetap dirampas, rakyat tetap dibungkam. Apa yang berubah? cuma dekorasi, negara tetap jadi alat represi dan eksploitasi. Revolusi yang

tidak menghancurkan negara bukan revolusi, tapi hanya suksesi kekuasaan seperti yang dilakukan para kiri-kiri sialan.

Tidak ada yang namanya negara revolusioner. Kita tidak butuh negara baru. Kita tidak butuh presiden baru. Kita tidak butuh sistem pemilu yang lebih adil. Kita tidak butuh lembaga anti-korupsi tambahan. Kita butuh dunia baru tanpa negara, sebagaimana kapitalisme tidak bisa dihapus dengan menjadi CEO. Negara tidak bisa dihapus dengan menjadi menteri, menjadi bagian dari sistem hanya akan membuat kita jadi pengelola represi yang lebih ramah, lebih sopan. Kalau kita ingin dunia yang benar-benar bebas, maka negara, dalam bentuk apapun harus dihancurkan.

Tentang Penulis

Vipaldi Desta adalah seorang imigran dari Mount Olympus yang terlempar ke bumi gara-gara gak mau cuci piring setelah sarapan pagi.

Kepustakaan

Ben-David, Joseph. (1977). Centers of Learning: Britain, France, Germany, United States. McGraw-Hill.

Claessen, H. J. M. & Skalník, P. (1978). The Early State. The Hague: Mouton.

Compayré, Gabriel. (1907). The History of Pedagogy. D. Appleton and Company.

David Graeber. *Fragments of an Anarchist Anthropology* (2004)

Dewey, John. (1916). Democracy and Education. Macmillan.

Gellner, Ernest. (1983). Nations and Nationalism. Cornell University Press.

Giddens, Anthony. (1985). The Nation-State and Violence. University of California Press.

Hobbes, Thomas. (1651). Leviathan. London: Andrew Crooke.

Illich, Ivan. (1971). Deschooling Society. Harper & Row.

James C. Scott. *The Art of Not Being Governed* (2009)

Locke, John. (1689). Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill.

Makdisi, George. (1981). The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh University Press.

Marx, Karl & Engels, Friedrich. (1848). The Communist Manifesto.

Michel Foucault, *Discipline and Punish* (1975), *Power/Knowledge* (1980)

Mikhail Bakunin. *Statism and Anarchy* (1873)

Peter Kropotkin. *The Conquest of Bread* (1892)

Rousseau, Jean-Jacques. (1762). Du Contrat Social.

Rüegg, Walter. (1992). A History of the University in Europe: Volume I: Universities in the Middle Ages. Cambridge University Press.

Jika kau ingin merasa nyaman, maka tutup catatan ini.
Jika kau ingin membakar sesuatu, mari kita mulai.

Pe'ar Press, 2025.

Pe'ar Press

CONTEMPLATIVE PUBLISHING

Talas Press 混沌